



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmptsp.banyuwangikab.go.id](http://dpmptsp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### Izin Praktik Fisioterapis

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

#### Persyaratan

1. KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara Pendidikan;
3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri
6. Pas Foto terbaru dan berwarna;
7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Banyuwangi
9. - Tambahan Persyaratan untuk Praktik Mandiri:
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
11. SPPL
12. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Izin Praktik Fisioterapis, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

#### Waktu Penyelesaian

35 Menit

#### Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmptsp.banyuwangikab.go.id](http://dpmptsp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SIPF (Surat Izin Praktik Fisioterapis)

### Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat